

PENGUATAN BUMDES MENUJU MASYARAKAT DESA YANG LEBIH SEJAHTERA DI KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

Dani Muhtada, Sudjono Sastroatmodjo, Ayon Diniyanto

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Diterima: Oktober 2018 Disetujui: November 2018 Dipublikasikan: Desember 2018

Abstrak

Salah satu tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah untuk menggerakkan perekonomian desa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayah perdesaan. Tetapi dalam praktiknya, pendirian dan pengelolaan BUMDES tidak jarang mengalami berbagai tantangan dan permasalahan. Beragam persoalan dan tantangan tersebut harus dapat diidentifikasi dengan baik, agar solusi strategisnya dapat diformulasikan dengan tepat. Artikel ini ditulis berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Tim Pengabdian melakukan kegiatan "Penguatan BUMDES menuju Masyarakat yang Lebih Sejahtera" dengan melakukan sosialisasi dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama 20 BUMDES yang ada di Kecamatan Mrebet. Dari hasil kegiatan tersebut, Tim Pengabdian berhasil mengidentifikasi beberapa persoalan dan tantangan yang dapat muncul dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMDES di wilayah setempat. Persoalan dan tantangan yang terkait dengan proses pendirian antara lain soal sumber daya manusia (SDM), jenis usaha yang akan dijalankan, permodalan, pemahaman masyarakat, partisipasi masyarakat, dan persaingan usaha. Adapun persoalan dan tantangan yang terkait dengan pengelolaan meliputi persoalan: sumber daya manusia, jenis usaha, modal, profesionalitas, dukungan dan kepercayaan masyarakat, dan perencanaan. Dari beragam persoalan dan tantangan tersebut, baik dalam proses pendirian maupun pengelolaan, ada beberapa hal yang dapat ditawarkan sebagai solusi dalam proses pendirian BUMDES: sosialisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, penentuan jenis usaha, dan penentuan modal. Sedangkan solusi untuk problem dan tantangan pengelolaan BUMDES antara lain: pendidikan dan pelatihan, manajemen jenis usaha secara profesional, pengelolaan modal, peningkatan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, dan pembuatan perencanaan secara lebih matang. Solusi-solusi tersebut diharapkan dapat membantu proses pendirian dan pengelolaan BUMDES yang lebih efektif dan efisien.

Keyword: Bumdes, Masyarakat desa sejahtera, Kabupaten Purbalingga

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip kesejahteraan. Artinya Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan atau welfarestate. Konsep negara kesejahteraan Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Pasal 34. Ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah disinggung sebelumnya merupakan konsep negara kesejahteraan (Ridwan 2013: 17-19).

Konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera telah dilakukan oleh negara Indonesia melalui berbagai instrumen hukum. Salah satu instrumen hukum yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau biasa disebut Undang-Undang Desa. Kehadiran Undang-Undang Desa sesungguhnya haus

disambut secara gembira oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dikarenakan Undang-Undang Desa membawa energi baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui Undang-Undang Desa juga perlu dilakukan dengan suatu pendekatan yang tepat. Salah satu pendekatan yang tepat adalah pendekatan bottom up. Selama ini pembangunan negara dilakukan secara top down yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Lahirnya Undang-Undang Desa harus mengubah pendekatan pembangunan dari top down ke bottom up. Sudah saatnya pembangunan dimulai dari desa sehingga kesejahteraan dapat tercapai secara adil dan merata (Eko, 2014: xxiii).

Undang-Undang Desa memberi amanat kepada desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Pengaturan tentang BUMDES tertuang dalam BAB X Pasal 87 s.d Pasal 90 Undang-Undang Desa. Tujuan dari BUMDES tidak lain adalah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat desa. Pendirian dan pengelolaan BUMDES harus tetap diawasi oleh pemerintah desa dan masyarakat agar tujuan utama BUMDES untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai (Putra, 2015: 11-12). Pendirian dan pengelolaan BUMDES sesungguhnya

telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut telah secara komprehensif mengatur terkait dengan mekanisme dan instansi dalam pendirian dan pengelolaan BUMDES.

Walaupun pendirian dan pengelolaan BUMDES sudah diatur secara komprehensif. Permasalahan terkait dengan pendirian dan pengelolaan BUMDES masih banyak terjadi. Akibatnya banyak desa yang belum bisa mendirikan BUMDES. Data sampai dengan awal tahun 2017 baru ada sekitar 18 ribu BUMDES yang berdiri (Kompas, 27 Maret 2017). Hal tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah desa yang mencapai 74 ribu. Melihat kondisi di daerah juga sama. Di Kabupaten Purbalingga misalnya tercatat sekitar 50 desa yang belum mendirikan BUMDES (Radar Banyumas, 13 November 2017). Data penelitian awal yang dilakukan oleh tim pengabdian memperlihatkan adanya permasalahan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDES di Kabupaten Purbalingga. Masalah yang dialami berbeda-beda di setiap desa dalam mendirikan dan mengelola BUMDES. Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga banyak desa yang mengalami permasalahan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDES.

Permasalahan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDES di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga meliputi (1) Terkendala dengan sumberdaya manusia; (2) BUMDES sudah didirikan tetapi belum dapat dikelola; (3) BUMDES berhenti beroperasi di tengah jalan; (4) BUMDES mendapatkan modal yang terbatas; dan (5) Pendirian BUMDES tidak didasarkan pada potensi dan kondisi desa. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut tentu harus diberikan jalan keluar atau solusi. Pemecahan masalah dengan tepat menjadi solusi yang diharapkan oleh pengelola BUMDES. Selain itu penguatan BUMDES juga perlu dilakukan agar tujuan didirikannya BUMDES untuk mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera dapat terwujud.

Metode Penelitian

Artikel ini dibuat berdasarkan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis, yang merupakan Tim Pengabdian FH UNNES, di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018. Pengabdian Masyarakat tersebut dilakukan dengan agenda Workshop, FGD dan Monitoring tentang Penguatan BUMDES. Agenda pengabdian masyarakat diikuti oleh Direktur BUMDES se Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan Camat Mrebet serta perwakilan Kepala Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Secara kronologis, kegiatan tersebut diawali dengan penyampaian materi tentang penguatan BUMDES, dilanjutkan dengan FGD yang diikuti

Tim Pengabdian UNNES sebagai fasilitator dan Direktur BUMDES se-Kecamatan Mrebet sebagai peserta.

Proses FGD ini dilakukan untuk menyerap permasalahan yang dialami oleh peserta dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMDES. FGD juga sebagai agenda untuk merumuskan solusi pemecahan masalah terhadap problem yang dihadapi oleh peserta dalam mendirikan dan mengelola BUMDES. Hasil dari FGD inilah yang menjadi bahan utama dalam penyusunan artikel ini pengabdian ini.

Hasil dan pembahasan

Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pendirian dan Pengelolaan BUMDES

Pendirian dan pengelolaan BUMDES merupakan dua hal yang sangat penting. Tanpa adanya pendirian dan pengelolaan BUMDES tidak mungkin BUMDES ada dan berjalan. Pendirian merupakan tahap awal untuk lahirnya BUMDES. Permasalahannya tidak semua pendirian BUMDES berjalan dengan lancar. Banyak masalah dan tantangan yang dialami dalam pendirian BUMDES. Pendirian BUMDES di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga juga menemui permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal diantaranya (1) Sumberdaya manusia; (2) Jenis usaha; (3) Modal BUMDES; (4) Pemahaman masyarakat; (5) Partisipasi masyarakat; dan (6) Persaingan usaha. Enam permasalahan dan tantangan tersebut setidaknya yang dialami dalam mendirikan BUMDES di Desa-Desa se Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Pertama, permasalahan dan tantangan terkait dengan sumberdaya manusia dalam mendirikan BUMDES. Banyak BUMDES di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang merasakan bahwa sumberdaya manusia menjadi permasalahan dan tantangan utama dalam pendirian BUMDES. Minimnya sumberdaya manusia secara kuantitas dan kualitas membuat pendirian BUMDES sering terhambat. Perlu diketahui bahwa pendirian BUMDES diutamakan adanya sumberdaya manusia yang memahami terkait dengan aturan dalam pendirian BUMDES. Keterbatasan sumberdaya manusia secara kualitas dan kuantitas membuat pendirian BUMDES tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan sumberdaya manusia akan berdampak pada pembentukan kepengurusan. Sumberdaya manusia yang minim secara kuantitas dan kualitas membuat pembentukan kepengurusan BUMDES berjalan lambat. Pembentukan pengurus BUMDES sesungguhnya merupakan hal yang tidak terpisahkan secara substansi dari pendirian BUMDES.

Kedua, yaitu permasalahan dan tantangan dalam mendirikan BUMDES adalah tentang jenis usaha. Kesulitan menentukan dan membuat jenis usaha menjadi permasalahan dalam pendirian BUMDES. Pendirian BUMDES harus diikuti dengan pembuatan jenis usaha

sehingga hal tersebut tidak boleh dikesampingkan. Permasalahan kesulitan menentukan jenis usaha sesungguhnya dikarenakan karena dasar untuk menentukan jenis usaha tidak didasarkan pada potensi atau kondisi desa. Hal tersebut membuat sulit untuk menentukan sasaran usaha. Kesulitan menentukan jenis usaha juga menyebabkan BUMDES over atau berlebihan dalam membentuk jenis usaha. Karena sulit menentukan jenis usaha dan deadlock dalam pemilihan jenis usaha. Kompromi penentuan jenis usaha menjadi titik temu. Akhirnya semua usulan jenis usaha diakomodasi oleh BUMDES yang baru berdiri. Akibat banyaknya rintisan jenis usaha tersebut, sumber potensial yang ada di desa tidak dapat dimanfaatkan karena tidak mempunyai fokus jenis usaha yang sesuai dengan kondisi desa.

Ketiga, modal juga menjadi permasalahan dan tantangan dalam mendirikan BUMDES. Banyak yang mengeluh terkait dengan modal dalam pendirian BUMDES. Umumnya mereka mengeluh karena modal dalam pendirian BUMDES relatif kecil. Jenis usaha dengan modal yang disertakan tidak sesuai atau seimbang sehingga pengelolaan jenis usaha tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut membuat pengurus BUMDES kedepannya bingung untuk mengelola BUMDES. Permasalahan terkait dengan modal sesungguhnya merupakan permasalahan yang relatif. Hal tersebut dikarenakan modal harus disesuaikan dengan jenis usaha BUMDES. Belum tentu modal besar, BUMDES berjalan lancar, dan belum tentu modal kecil, BUMDES tidak berjalan. Artinya modal harus disesuaikan terlebih dahulu dengan jenis usaha. Jadi pemilihan atau pembentukan jenis usaha sangat berpengaruh besar terhadap peruntukan modal. Oleh karena itu penentuan jenis usaha harus disesuaikan dengan potensi atau kondisi desa. Hal tersebut agar modal yang dikeluarkan dapat dihitung secara terencana dan dapat mempunyai hasil yang baik.

Keempat, permasalahan dan tantangan yang menyelubungi dalam pendirian BUMDES adalah pemahaman masyarakat. Hadirnya BUMDES selama ini ternyata belum diikuti dengan pemahaman yang menyeluruh dari masyarakat desa terkait dengan BUMDES. Hal tersebut tentunya membuat terjadinya permasalahan dan tantangan dalam mendirikan BUMDES. Pemahaman masyarakat tentang BUMDES sangat diperlukan dalam pendirian BUMDES. Minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan BUMDES membuat pendirian BUMDES mempunyai pro dan kontra di masyarakat. Pendirian BUMDES pada desa-desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengalami permasalahan tersebut. Rendahnya pemahaman tentang BUMDES di tingkat masyarakat desa membuat banyak pandangan negatif terkait dengan BUMDES, padahal tujuan utama dari BUMDES adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Walaupun demikian masih ada beberapa yang paham terkait dengan BUMDES sehingga mampu membawa pandangan positif tentang BUMDES. Rendahnya pemahaman masyarakat

desa terkait BUMDES sesungguhnya merupakan permasalahan yang serius. Penanganan permasalahan dan tantangan tersebut harus segera dilakukan agar tidak menyebabkan dampak negatif. Dampak negatif dari rendahnya pemahaman masyarakat desa terkait BUMDES adalah pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan rendah dalam mendirikan atau mengelola BUMDES jika masyarakat desa belum memahami tentang BUMDES. Bagaimana mungkin masyarakat desa akan ikut berpartisipasi secara aktif adalah pendirian BUMDES, jika masyarakat desa sendiri tidak mengetahui tentang BUMDES. Oleh karena itu pemahaman masyarakat desa terkait BUMDES harus diberikan secara luas dan menyeluruh.

Kelima, permasalahan serta tantangan lanjutan dalam pendirian BUMDES adalah partisipasi masyarakat yang rendah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap BUMDES akan berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendirian BUMDES. Jadi permasalahan dan tantangan rendahnya partisipasi masyarakat salah satunya berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat desa terkait dengan BUMDES. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendirikan BUMDES menjadi dilema dalam pendirian BUMDES. Dilema tersebut terjadi karena ketika BUMDES sudah berdiri tetapi tidak ada partisipasi masyarakat yang tinggi, maka BUMDES akan mendapat tuduhan negatif dan beragam dari masyarakat desa. Umumnya masyarakat desa beranggapan bahwa BUMDES hanya untuk kepentingan sekelompok tertentu, selain itu juga pendirian BUMDES akan sia-sia karena hanya menghabiskan anggaran desa. Anggapan tersebut sesungguhnya wajar mengingat masyarakat belum memahami terkait dengan konsep BUMDES. Oleh karena itu pemberian pemahaman tentang BUMDES harus dilakukan sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Keenam, permasalahan dan tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam pendirian BUMDES adalah persaingan usaha di desa. Banyak pengurus BUMDES di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang merasa adanya persaingan usaha dalam pendirian BUMDES. Hal tersebut membuat jenis usaha yang didirikan dan dijalankan BUMDES harus bersaing secara ketat dengan usaha-usaha yang sudah ada di desa. Jika BUMDES kalah dalam persaingan usaha maka BUMDES akan mengalami kerugian yang dapat menimbulkan berhentinya roda pengelolaan BUMDES. Adanya persaingan usaha dalam pendirian BUMDES sesungguhnya merupakan simalakama. Artinya persaingan jenis usaha seharusnya tidak boleh terjadi dalam pendirian BUMDES. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan didirikannya BUMDES adalah untuk menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Jangan sampai BUMDES didirikan tetapi menghancurkan atau

mematikan usaha-usaha masyarakat yang sudah ada terlebih dahulu. Kondisi tersebut lebih baik BUMDES tidak perlu dilanjutkan jenis usahanya dan harus mengganti jenis usaha. Kesalahan pemilihan dan pembuatan jenis usaha yang tidak didasarkan pada potensi serta kondisi desa jelas sekali akan menyebabkan persaingan usaha di desa. Oleh karena itu pembentukan jenis usaha yang ada di desa harus didasarkan pada potensi dan kondisi desa. Hal tersebut agar pendirian BUMDES tidak mematikan usaha masyarakat yang lebih dahulu berjalan.

Permasalahan dan tantangan diatas merupakan ralitas yang dihadapi dalam pendirian BUMDES. Penyelesaian dari permasalahan dan tantangan tersebut sangat dibutuhkan agar pendirian BUMDES sesuai dengan ketentuan dan juga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain permasalahan dan tantangan dalam pendirian BUMDES. Pengelolaan BUMDES juga mempunyai permasalahan dan tantangan. BUMDES-BUMDES yang ada di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES. Permasalahan dan tantangan tersebut diantaranya (1) Sumberdaya manusia; (2) Jenis usaha; (3) Modal; (4) Profesionalitas; (5) Dukungan dan kepercayaan masyarakat; (6) Perencanaan. Permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES sesungguhnya hampir sama dengan permasalahan dan tantangan dalam pendirian BUMDES. Perbedaannya adalah permasalahan dan tantangan dalam pendirian BUMDES lebih bersifat umum atau konsep. Adapun permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES lebih bersifat teknis atau konkrit.

Pertama, permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES adalah sumberdaya manusia. Jumlah sumberdaya manusia yang berkualitas didesa secara kuantitas sesungguhnya sangat terbatas. Hal itu menjadi permasalahan dan tantangan yang sangat berat dalam mengelola BUMDES. Desa kesulitan mencari sumberdaya manusia untuk mengelola BUMDES. Walaupun syarat atau kriteria pengelola BUMDES sudah diturunkan sehingga relatif mudah atau bisa terpenuhi tetapi keengganan dari masyarakat desa untuk mengelola BUMDES masih ada. Artinya problem pengelolaan BUMDES tidak hanya masalah kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Masalah lain yang lebih penting terkait dengan pengelolaan BUMDES adalah tidak ada kemauan dari sumberdaya manusia di desa untuk mengelola BUMDES. Artinya tingkat kemauan masyarakat untuk mengelola BUMDES masih rendah. Masyarakat masih belum banyak yang mempunyai kemauan untuk mengelola BUMDES. Masalah dan tantangan bertambah terkait dengan sumberdaya manusia untuk mengelola BUMDES. Tambahan masalah dan tantangan yang dimaksud adalah dari hanya kemampuan sumberdaya manusia ditambah dengan kemauan sumberdaya manusia dalam mengelola BUMDES.

Kedua, jenis usaha juga menjadi permasalahan dan tantangan dalam mengelola BUMDES. Jika sebelumnya telah disebutkan bahwa permasalahan terkait dengan jenis usaha karena kesalahan dalam menentukan jenis usaha yang tidak didasarkan pada potensi atau kondisi desa. Pengelolaan BUMDES selain masalah dan tantangan tersebut juga mempunyai masalah dan tantangan tambahan dalam pengelolaan jenis usaha BUMDES. Masalah dan tantangan tambahan jenis usaha BUMDES adalah pengelolaan usaha yang berhenti. Kesalahan pengelolaan membuat banyak jenis usaha BUMDES mengalami masalah dan antangan. Masalah dan tantangan yang dialami jenis usaha BUMDES misalnya jenis usaha simpan pinjam mengalami kredit macet, jenis usaha air bersih mengalami kekringan air, jenis usaha perdagangan mengalami kekurangan produk. Masalah dan tantangan tersebut sesungguhnya terletak pada dua aspek yaitu jenis usaha yang tidak sesuai dengan potensi, kondisi atau kebutuhan masyarakat desa dan jenis usaha yang tidak dilakukan dengan menejemen yang tepat. Akibatnya masalah dan tantangan tersebut terjadi sehingga dapat mengakibatkan berhentinya jenis usaha.

Ketiga, modal selain menjadi permasalahan dan tantangan dan pendirian BUMDES. Modal juga menjadi masalah dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES. Banyak pengurus BUMDES yang mengeluh terkait dengan pengelolaan BUMDES. Mereka umumnya mengeluh karena modal untuk mengelola jenis usaha BUMDES terbatas sehingga tidak bisa leluasa untuk mengembangkan jenis usaha. Jika melihat pengelolaan BUMDES, modal seharusnya tidak menjadi permasalahan dan tantangan serius dalam pengelolaan BUMDES. Hal tersebut karena modal telah ditentukan sejak atau bahkan sebelum BUMDES berdiri. Seharusnya pengelola BUMDES sudah memahami terkait dengan jenis usaha yang dijalankan dan berapa modal yang telah disertakan. Pengelola seharusnya sudah memprediksi atau mengkalkulasi terkait dengan jenis usaha dan modal yang ada sejak awal. Artinya permasalahan dan tantangan terkait dengan modal sesungguhnya tidak menjadi yang utama dalam pengelolaan BUMDES.

Keempat, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDES adalah profesionalitas. Profesionalitas pengurus sangat dipelukan agar pengelolaan BUMDES juga profesional. Tanpa adanya profesionalitas dari pengurus BUMDES maka pengelolaan BUMDES juga tidak akan dapat mewujudkan profesionalitas. Jadi kunci profesionalitas pengelolaan BUMDES terletak pada profesionalitas pengurus. Selama ini masih banyak pengelolaan BUMDES yang belum profesional. Hal tersebut menjadi masalah dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES. Masalah dan tantangan terkait dengan profesionalitas pengurus BUMDES disebabkan beberapa hal diantaranya kapasitas sumberdaya pengurus dan kemampuan menjerial dari pengurus. Dua hal tersebut sangat berkaitan dan berpengaruh besar terhadap penentuan

profesionalitas pengurus BUMDES. Saat ini banyak pengurus BUMDES yang belum mempunyai kapasitas. Kapasitas yang dimaksud adalah ilmu dan wawasan terkait dengan pengelolaan BUMDES. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kapasitas dalam pengelolaan BUMDES. Selain kapasitas, juga ada kemampuan manajerial terhadap BUMDES. Kemampuan manajerial dari pengurus BUMDES saat ini masih banyak yang belum tepat. Hal tersebut berdampak pada pengelolaan BUMDES yang tidak profesional. Akibatnya sulit untuk menangani resiko dan menyusun program atau rencana usaha BUMDES. Rendahnya kemampuan manajerial pengurus dalam mengelola BUMDES diakibatkan oleh pengalaman atau track record.

Kelima, dukungan dan kepercayaan masyarakat ternyata menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES. Pengurus BUMDES beranggapan bahwa dukungan dan kepercayaan masyarakat desa sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan BUMDES yang berkelanjutan. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat desa, pengurus BUMDES tidak mungkin akan bisa berjalan. Hal tersebut karena semangat BUMDES lahir dari masyarakat bukan dari pemerintah desa, pengusaha, modal atau jenis usaha. Mengingat yang akan menggunakan jenis usaha atau produk BUMDES adalah masyarakat desa. Hal yang sama juga berlaku terhadap kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka pengelolaan BUMDES tidak dapat berkelanjutan. Pengguna atau konsumen produk dan hasil jenis usaha BUMDES sebagian adalah masyarakat desa. Jadi kalau masyarakat desa sudah tidak percaya dengan BUMDES maka jenis usaha atau produk BUMDES bahkan pengelolaan BUMDES sudah berada pada titik nadir. Oleh karena itu meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat sangat diperlukan sebagai salah satu cara agar pengelolaan BUMDES dapat berkelanjutan.

Keenam, masalah dan tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDES adalah perencanaan. Sampai saat ini masih banyak BUMDES yang didirikan dan dikelola tetapi tidak mempunyai perencanaan jangka pendek, menengah atau panjang. Banyak BUMDES yang masih berprinsip asal jalan atau yang penting jalan terlebih dahulu. Prinsip tersebut sesungguhnya tidak tepat dan tidak baik. Hal tersebut karena pengelolaan BUMDES tidak fokus dan tidak mempunyai target serta tujuan. Keberlanjutan dan kemajuan BUMDES tidak bisa diprediksi dan kematian BUMDES akan sangat mudah dilakukan. Oleh karena itu perencanaan pengelolaan BUMDES sangat diperlukan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi masih banyak pengurus BUMDES yang belum bisa menyusun perencanaan pengelolaan BUMDES. Keterbatasan sumberdaya manusia secara kapasitas membuat pengurus BUMDES kesulitan membuat perencanaan pengelolaan BUMDES. Kedepan permasalahan dan tantangan terkait dengan perencanaan pengelolaan BUMDES tidak boleh

terjadi lagi. Pengurus BUMDES harus diberikan pemahaman dan cara untuk menyusun perencanaan pengelolaan BUMDES.

Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera

Permasalahan dan tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya tentu membutuhkan solusi. Solusi tersebut perlu dilakukan untuk memecahkan masalah dan tantangan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDES. Solusi yang dimaksud juga tidak lain dalam rangka penguatan BUMDES menuju masyarakat desa yang lebih sejahtera. Solusi permasalahan dan tantangan pendirian BUMDES agar menjadi kuat adalah dengan melakukan beberapa hal diantaranya (1) sosialisasi tentang BUMDES; (2) peningkatan partisipasi masyarakat; (3) menentukan jenis usaha; dan (4) menentukan modal.

1. Sosialisasi tentang BUMDES

Permasalahan dan tantangan utama dalam pendirian BUMDES tidak lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat desa terhadap BUMDES. Pemahaman masyarakat yang masih rendah secara kualitas dan kuantitas tentang BUMDES membuat pendirian BUMDES mengalami permasalahan dan tantangan yang substansial. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya yaitu kesalahan pendirian BUMDES karena tidak sesuai dengan aturan, kekeliruan penentuan jenis usaha karena tidak didasarkan pada potensi atau kondisi desa, dan penentuan modal usaha yang tidak sesuai. Permasalahan tersebut sesungguhnya bermula dari rendahnya pemahaman masyarakat desa terkait dengan BUMDES

Oleh karena itu dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait dengan BUMDES yang berujung untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pendirian BUMDES. Pemberian pemahaman kepada masyarakat desa terkait dengan BUMDES perlu dilakukan. Pemberian pemahaman kepada masyarakat desa terkait BUMDES dapat dilakukan dengan metode sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan BUMDES kepada masyarakat desa merupakan solusi utama dan pertama yang harus dilakukan. Tanpa adanya sosialisasi terhadap masyarakat desa terkait dengan BUMDES, maka pemahaman masyarakat desa terkait BUMDES akan sulit untuk mengalami peningkatan. Sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh. Maksudnya harus semua masyarakat desa mengetahui terkait dengan BUMDES. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan sampai kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat RT dengan konsekuensi harus berkelanjutan. Materi sosialisasi juga harus jelas dan mudah diterima oleh masyarakat.

Jika masyarakat sudah menerima sosialisasi dan memahami terkait dengan BUMDES, maka pendirian BUMDES yang dipelopori oleh masyarakat akan sesuai

dengan tujuan didirikannya BUMDES yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu sosialisasi tidak boleh luput dari cara untuk melakukan penguatan BUMDES.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Permasalahan dan tantangan terkait dengan pendirian BUMDES selanjutnya adalah terkait dengan partisipasi masyarakat. Masalah rendahnya partisipasi masyarakat tidak heran karena penyebabnya adalah rendahnya pemahaman terkait dengan BUMDES. Rendahnya pemahaman terkait dengan BUMDES berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendirian BUMDES. Permasalahan dan tantangan tersebut tentu harus diselesaikan. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menyelesaikan rendahnya partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menarik partisipasi masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk terlibat terkait dengan partisipasi masyarakat. Adanya dorongan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pendirian BUMDES merupakan hal yang sangat penting dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat. Apabila peningkatan partisipasi masyarakat terjadi, maka pendirian BUMDES akan melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi.

3. Menentukan Jenis Usaha

Permasalahan dan tantangan selanjutnya dalam pendirian BUMDES adalah terkait dengan penentuan jenis usaha. Kesulitan dalam menentukan jenis usaha BUMDES membuat pendirian BUMDES mendapatkan permasalahan dan tantangan. Masyarakat banyak mengalami kesulitan dalam menentukan jenis usaha dalam pendirian BUMDES. Kesulitan masyarakat dalam menentukan jenis usaha BUMDES tidak hanya dikarenakan oleh pemahaman masyarakat tentang BUMDES. Kesulitan untuk mengidentifikasi potensi atau kondisi desa juga merupakan alasan utama munculnya permasalahan dan tantangan dalam menentukan jenis usaha BUMDES. Selain itu penentuan jenis usaha yang salah juga akan menyebabkan persaingan usaha dengan masyarakat desa yang akan menyebabkan kerugian antara BUMDES atau masyarakat desa. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dibiarkan karena tujuan dari pendirian BUMDES adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Solusi dari permasalahan dan tantangan tersebut adalah adanya menentukan jenis usaha berdasarkan potensi atau kondisi desa. Penentuan jenis usaha harus didasarkan pada potensi atau kondisi desa. Jika penentuan jenis usaha dilakukan dengan hal demikian maka permasalahan atau tantangan terkait dengan penentuan jenis usaha dapat terselesaikan dengan baik. Masyarakat akan mengalami kemudahan dalam menentukan jenis usaha BUMDES jika didasarkan pada potensi dan kondisi desa. Selain itu

persaingan jenis usaha antara BUMDES dengan masyarakat tidak akan terjadi.

4. Menentukan Modal BUMDES

Permasalahan dan tantangan yang keempat dalam pendirian BUMDES adalah menentukan modal BUMDES. Menentukan modal BUMDES dikeluhkan oleh para masyarakat yang mendirikan BUMDES. Mereka menyangkan penganggaran modal BUMDES yang relatif kecil dari Pemerintah Desa membuat penentuan modal BUMDES untuk menjalankan usaha nantinya terhambat. Jika melihat permasalahan tersebut, sesungguhnya penentuan modal BUMDES atau kuantitas modal BUMDES yang relatif kecil tidak menjadi permasalahan. Permasalahan terkait dengan penentuan modal BUMDES sesungguhnya dikarenakan karena jenis usaha yang tidak sesuai dengan potensi atau kondisi desa. Jika jenis usaha sesuai dengan potensi atau kondisi desa, maka penentuan modal BUMDES tidak akan menjadi beban. Modal BUMDES akan relatif mengikuti jenis usaha. Jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kondisi desa tentu tidak akan menyita modal yang besar karena efektif. Oleh karena itu penentuan jenis usaha desa berdasarkan potensi atau kondisi desa menjadi solusi untuk menangani permasalahan terkait dengan penentuan modal usaha BUMDES.

Selain penguatan dalam pendirian BUMDES, diperlukan juga penguatan dalam pengelolaan BUMDES. Permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES seperti yang telah disebutkan sebelumnya harus diberikan solusi dalam rangka penguatan pengelolaan BUMDES. Solusi yang dimaksud adalah dengan (1) pendidikan dan pelatihan; (2) manajemen jenis usaha secara profesional; (3) pengelolaan modal; (4) peningkatan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat; dan (5) pembuatan perencanaan.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan dan tantangan utama dalam pengelolaan BUMDES adalah sumberdaya manusia. Permasalahan dan tantangan terkait dengan sumberdaya manusia harus diselesaikan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan. Kualitas dan kapabilitas yang rendah dari pengelola BUMDES merupakan permasalahan sumberdaya manusia yang harus diselesaikan dengan pendidikan dan pelatihan. Adanya pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan BUMDES diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas pengelola BUMDES.

Pendidikan dan pelatihan tersebut harus diselenggarakan baik oleh internal BUMDES atau pihak-pihak lain yang berkeinginan membantu peningkatan kualitas dan kapabilitas pengelola BUMDES. Pendidikan dan pelatihan tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dibimbing oleh pengajar yang kompeten terhadap pengelolaan BUMDES. Jika pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan BUMDES diberikan

secara tersistem dan berkelanjutan maka peningkatan kualitas dan kapabilitas pengelola BUMDES akan terjadi. Peningkatan profesionalitas pengelola BUMDES juga akan terjadi. Artinya permasalahan dan tantangan sumberdaya manusia dalam mengelola BUMDES akan dapat diatasi.

2. Menejemen Jenis Usaha secara Profesional

Permasalahan selanjutnya dalam pengelolaan BUMDES adalah menejemen jenis usaha. Selama ini pengelolaan atau menejemen jenis usaha masih belum tertata. Oleh karena itu penataan menejemen jenis usaha harus dilakukan. Profesionalitas pengelola BUMDES harus yang utama. Artinya pengelola BUMDES harus menjalankan tugas secara profesional. Tidak boleh mencampur adukan urusan luar BUMDES dengan urusan BUMDES. Struktur pengelolaa BUMDES harus profesional dan sesuai aturan. Apabila struktur pengelola BUMDES sudah profesional maka pengelolaan BUMDES mempunyai potensi besar berjalan profesional. Jangan sampai pengelolaan BUMDES dijalankan tidak secara profesional karena struktur pengurus tidak dilakukan secara profesional seperti susunan dan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES.

3. Pengelolaan Modal

Pengelolaan Modal yang efektif dan efisien serta tepat merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan dan tantangan pengelolaan BUMDES. Seperti diketahui bersama bahwa modal usaha BUMDES telah menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES. Sesungguhnya modal usaha BUMDES tidak menjadi permasalahan dan tantangan jika modal usaha tersebut dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengelolaan modal usaha BUMDES selama ini dapat diduga belum efektif, efisien, dan kurang tepat sasaran sehingga mengalami permasalahan dan tantangan. Kedepan pengelolaan modal usaha BUMDES harus dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan yang matang serta sistem yang canggih akan sangat mendukung terealisasinya pengelolaan modal BUMDES yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

4. Peningkatan Dukungan dan Kepercayaan dari Masyarakat

Hampir sama halnya dengan pendirian BUMDES, pengelolaan BUMDES juga mempunyai permasalahan dan tantangan terkait dengan masyarakat. Problem dan tantangan tersebut yaitu berkaitan dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan BUMDES. Minimnya dukungan masyarakat berpengaruh terhadap percaya diri atau semangat pengelola BUMDES dalam mengelola BUMDES. Adapun rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDES berpengaruh terhadap daya yang dikelola oleh BUMDES. Oleh karena itu peningkatan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat

terhadap BUMDES harus dilakukan. Hal tersebut agar BUMDES mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu juga agar BUMDES mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Legitimasi BUMDES selain dari hukum juga dari masyarakat sangat penting mengingat masyarakat sebagai subyek utama BUMDES.

5. Pembuatan Perencanaan

Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDES yaitu tidak adanya perencanaan yang matang. Tidak adanya perencanaan yang matang membuat pengelolaan usaha BUMDES berpotensi besar untuk berhenti atau mengalami jalan buntu. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang matang dalam pengelolaan BUMDES. Pembuatan perencanaan pengelolaan BUMDES merupakan hal yang wajib. Hal tersebut karena perencanaan dapat dijadikan sebagai pedoman aserta tujuan dalam mengelola BUMDES. Pembuatan perencanaan harus dilakukan secara matang agar tidak menemui jalan buntu. Perencanaan juga harus dilakukan secara berjangka dan berkala. Hal tersebut agar tercipta indikator-indikator dan target dalam pengelolaan BUMDES. Jika perencanaan pengelolaan BUMDES dibentuk maka permasalahan terkait dengan jenis usaha BUMDES yang berpotensi berhenti karena tidak adanya perencanaan tidak akan terjadi.

Solusi-solusi yang telah disebutkan tersebut merupakan cara untuk melakukan penguatan pendirian dan pengelolaan BUMDES dalam rangka menuju masyarakat desa yang lebih sejahtera. Oleh karena itu penerapan solusi tersebut harus dilakukan oleh para pendiri dan pengelola BUMDES.

Simpulan

Pendirian dan pengelolaan BUMDES merupakan salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian Desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Sayangnya pendirian dan pengelolaan BUMDES mempunyai permasalahan dan tantangan. Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga permasalahan dan tantangan dalam pendirian BUMDES adalah (1) Sumberdaya manusia; (2) Jenis usaha; (3) Modal BUMDES; (4) Pemahaman masyarakat; (5) Partisipasi masyarakat; dan (6) Persaingan usaha. Enam permasalahan dan tantangan tersebut setidaknya yang dialami dalam mendirikan BUMDES di Desa-Desa se Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Adapun permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan BUMDES di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah (1) Sumberdaya manusia; (2) Jenis usaha; (3) Modal; (4) Profesionalitas; (5) Dukungan dan kepercayaan masyarakat; (6) Perencanaan.

Permasalahan dan tantangan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDES harus diberikan solusi. Solusi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dalam pendirian BUMDES adalah (1) sosialisasi tentang BUMDES; (2) peningkatan partisipasi masyarakat; (3) menentukan jenis

usaha; dan (4) menentukan modal. Adapun solusi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pengelolaan BUMDES yaitu (1) pendidikan dan pelatihan; (2) manajemen jenis usaha secara profesional; (3) pengelolaan modal; (4) peningkatan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat; dan (5) pembuatan perencanaan.

Daftar Pustaka

- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Kompas. 27 Maret 2017. Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit. diakses 20 Februari 2018, dari laman <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.18.446.unit>
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Radar Banyumas. 13 November 2017. 50 Desa Belum Punya BUMDES. diakses 20 Februari 2018, dari laman <http://radarbanyumas.co.id/50-desa-belum-punya-bumdes/>
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.